**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

*RIFKHA FAIKHOTUL HIMMAH*

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika danBisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

e-mail:rifkhafaikhotulhimmah@gmail.com

Drs. Anwar Made., M.Si., Ak,Ca

Eris Dianawati., S.Pd,. Mm

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)

***ABSTRAK*:** Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meingkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang). Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan masih banyak kekurangan – kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) double, juga adanya wajib pajak yang tidak taat. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 204,06%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif yang menurut kriteria berarti cukup baik.

**Kata kunci**: Efektivitas Pemungutan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997, telah berlaku sejak disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 dan munculnya Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah maka wewenang pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dan otonomi daerah ini dilihat dari persepektif organisasi dan manjemen yang lebih menekankan pada aspek efesien dan efektivitas pelaksanaan tugas, membuat pemerintah pemerintah daerah melakukan persiapan untuk meningkatkan anggaran pendapatan bagi daerah. Persiapan tersebut dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam melaksanakan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar, diperlukan evaluasi mengenai Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan pedesaan dan perkantoran untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah di jalankan saat ini agar pada saat pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan sepenuhnya di tangani oleh Kabupaten Malang sudah lebih baik dari sebelumnya.

S.Aji Suryo, 2006 : 14-2) Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek  
yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005. Dengan adanya permasalahan mengenai data Pajak Bumi dan Banguan Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang masih belum akurat dan masalah-masalah yang lainnya maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik serta tindakan yang tegas oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang. Karena apabila permasalahan yang terjadi tidak diselesaikan dapat memepengaruhi peningkatan pendapatan diakses Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Malang terkendali perilaku aparat desa nakal dari sektor pajak. Jika peningkatan pendapatan daerah berkurang dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan dari daerah khususnya Kabupaten Malang serta akan mempengaruhi hasil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pendapatan**

Menurut Hani Handoko (2000) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : *“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target* *(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target* *yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.*

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35)

adalah sebagai berikut :*“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara* *membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi* *atau sesungguhnya (OS), jika (OS) > (OA) disebut efektif ”*

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka pekerjaan itu kurang efektif..

.

**Pengukuran Pendapatan**

Keluaran *(output)* yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran *(output)* tidak berwujud *(intangible)* yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil *(outcome)* seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja *(judgement)*, artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “*Individual and Society”* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok”* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan *(ratio)* antara masukan *(input)* dengan keluaran *(output)*.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (dalam Danim, 2004:119-120).

**Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang di kenal dengan nama four cannons atau the four maxims dengan uraian sebagai berikut.

emberikan dasar pembenaran pemungutan pajak adalah:

1. **Teori ansuransi**

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perserongan. Oleh sebab itu , negara disamakan dengan perusahaan ansuransi untuk dapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditingglkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataanya, yakni jika orang misalnya meninggal kecelakaan atau kehilangan, negara kita akan mengganti kerugian seperti halnya dalam ansuransi. Disamping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai pelindunganya terhadap pembayaran pajak.

1. **Teori kepentingan**

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang di peroleh dari pekerjaan negara. Makin besar pajaknya. Teori ini merupakan masih berlaku pada retribusi sukur pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

1. **Teori daya pikul/teori gaya pikul**

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pukul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaanya, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.

**Menurut Prof. W. J. De Langen**

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhn setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah hak untuk hidup maka sebagai analisis yang pertama adalah minuman kehidupan (bestaans minimium).

**Menurut mr. A.J. Cohen stuart**

Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan. Yang pertama-tama harus dapat menukul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Beliau menyerahkan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam jaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini ditetapkan dalam pajak penghasilan, dimana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila diperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

1. **Teori Kewajiban Mutlak Pajak Atau Teori Bakti**

Teori sudah di dasari paham organisasi negara (organische staatsleer) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum . Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka rakyat mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda buktinya.

Menurut teori ini berdasarkan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat mewajibkanya membayar pajak. Kelemahan dari teori adalah negara bisa menjadi otoroter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

1. **Teori daya beli**

teori ini adalah teori modern,teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat pada ëfeknya” dan memandang efek yang lain itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan “pompa” yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan. Bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, pun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.

**Subjek pajak dan objek pajak bumi dan bangunan**

1. **Subjek pajak**

Diana dan Setiawati (2010:751), subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sopannoko (2008:195), subjek pajak adalah adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan**.**

1. **Objek pajak**

Objek pajak dalam PBB adalah bumi dan bangunan. Adapun yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

Menurut Suharno (2003:25), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan , perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas didalam penjelasan sebagai berikut:

1. Sektor Pedesaaan adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-cir pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
2. Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, komplek pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
3. Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang-Jawa Timur, karena peneliti ingin mengetahui efektifitas Sistem Pengendalian Interen Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Dibawah ini ruang lingkup Sistem Pengendalian Intern serta Pajak Bumi Dan Bangunan

Pemerintah Kabupaten Malang

Sistem Pengendalian Intern 2011

Sistem Pengendalian Intern 2012

Sistem Pengendalian Intern 2012

Target

Target

Target

Realisasi Penerimaan PBB 2011

Realisasi Penerimaan PBB 2012

Realisasi Penerimaan PBB 2012

Gambar 3.2

Ruang Lingkup Penelitian

**Jenis data dan sumber data**

**Jenis Data**

Jenis data yang digunakan kualitatif data yang berupa wawancara dan obserfasi yang diperoleh secara langsung dari responden, dimana menggambarkan keadaan kantor pendapatan asli daerah dikawasan pendapatan asli derah kabupaten malang secara langsung di jadikan objek penelitian

**3.3.2** **Pemilihan Metode Kualitatif**

Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, setiap peneliti perlu mengidenitifikasi Apakah Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan klarifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

**3.3.3 Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data

Jenis data yang di gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang di maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, jenis penelitian ini termasuk dalam jenis diskriptif,yaitu penelitian hanya menggambarkan meringkas sebagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.

1. Sumber data

Sesuai jenis data yang di butuhkan maka sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari catatan atau dokumen perusahaan. Berdasarkan jenis data maka sumber data yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Data skunder

Data skunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa formulir bukti dan catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainya. Data skunder yang digunakan untuk meneliti adalah :

Mengetahui efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan apa sudah baik dan efektif dalam upaya peningkatanya

**Target Pendapatan Asli Daerah**

Rencana penerimaan (target) PAD, disusun dengan menggunakan beberapa variabel, antara lain:

1. Kondisi potensi atau data objek pungutan dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan
2. Tingkat realisasi penerimaan pada tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya.
3. Estimasi perkembangan dan kondisi di lapangan
4. Faktor-faktor pendukung seperti tarif, penagihan tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.
5. Karakter masing-masing jenis pungutan terutama PAD tidak sama.
6. Penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sangat erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
7. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasiona;

Gambaran hasil kumpulan yang telah di peroleh adapun data yang di peroleh dalam penelitian iniadalah sebagai berikut:

1. Target dan Rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan pada perdesaan dan perkotaan dari pemerintah kabupaten malang tahun 2011-2014.
2. Realisasi rencana penerimaan atau target pajak bumi dan bangunan pada perdesaan dan perkotaan dari pemerintah kabupaten malang pada tahun 2011-2014
3. Realisasi baku pajak bumi dan bangunan pada perdesaan dan perkotaan dari pemerintah kabupaten malang pada tahun 2011-2014

**Tabel 4.1**

**Target Ralisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2011-2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **PBB** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Pertumbuhan** |
| 1 | 2011 | Perdesaan | 17.678.047.625 | 28.85053.3645 |  |
|  |  | Perkotaan | 17.117.810.87 | 15.546.666.964 |  |
|  |  | Jumlah | 34.795.858.500 | 44.397.200.209 | 27,59 |
| 2 | 2012 | Perdesaan | 23.251.455.524 | 29.901.813.561 |  |
|  |  | Perkotaan | 14.935.389.138 | 16.814.570.827 |  |
|  |  | Jumlah | 38.150.844.662 | 46.716.484.388 | 22,45% |
| 3 | 2013 | Perdesaan | 31.778.417.000 | 33.436.629.287 |  |
|  |  | Perkotaan | 17.731.224.000 | 18.566.636.746 |  |
|  |  | Jumlah | 49.509.641.000 | 52.003.266.033 | 05,04% |
| 4 | 2014 | Perdesaan | 30.693.986.428 | 32.063.420.678 |  |
|  |  | Perkotaan | 17.306.013.572 | 19.455.618.557 |  |
|  |  | Jumlah | 48.000.000.000 | 51.519.039.235 | 7,33% |

*Sumber :Data Diolah*

Pertumbuhan target dan realisasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan pada pemerintah kabupaten malang 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011-2014 dapat di cari menggunakan rumus di bawah ini

Rumus Pertumbuhan PBB = ( Realisasi PBB­ - Target PBB ) X100%

Target PBB

Uraian

NO TAHUN

1. 2011 (44.397.200.209 - 34.795.858.500) X100%

34.795.858.500

= 27,59%

2. 2012 (46.716.484.388 – 38.150.844.662) X100%

38.150.844.662

= 22,45%

3. 2013 (52.003.266.033 - 49.509.641.000) X100%

49.509.641.000

=5,04%

4. 2014 (51.519.039.235 - 48.000.000.000) X100%

48.000.000.000

=7,33%

.

**Analisis Hasil Penelitian**

Analisa yang di gunakan oleh peneliti adalah menggunakan kualitatif diskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya pelaku, persepsi, motifasi, tidakan, perilaku dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara diskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiyah.

analisis kualitatif diskriptif ini selain untuk memastikan apakah sudah efektif pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam pemerintahan kabupaten malang.

**Efektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2011-2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Target** | **Realisasi (Rp)** | **Efektifitas** | **Kriteria** |
| 1 | 2011 | 34.759.858.500 | 44.397.200.209 | 127.59% | Sangat efektif |
| 2 | 2012 | 38.150.844.662 | 46.716.484.388 | 122.59% | Sangat efektif |
| 3 | 2013 | 49.509.641.000 | 52.003.266.033 | 105,1% | Sangat efektif |
| 4 | 2014 | 48.000.000.000 | 51.319.039.234 | 107,1% | Sangat efektif |
| **Rata-rata efektifitas Pajak bumi dan bangunan** | | | | 115,62% | Sangat efektif |

*sumber : Data Di Olah*

Rumus Pertumbuhan PBB = ( Realisasi PBB­ - Target PBB ) X 100%

Target PBB

Uraian

1. 2011 44.397.200.209 X 100%=127,59%

34.759.858.500

2. 2012 46.716.484.388 X 100%=122,45$

38.150.844.662

3. 201349.509.641.000 X 100%=105,1%

52.003.266.033

4. 2014 51.319.039.234 X 100%=115,62%

48.000.000.000

5. Rata-Rata Efektifitas = Total Efektifitas

Jumlah Tahun

(127,59%+122,45%+105,1%+107,33%)

4 Tahun

=115,64%

Dari hasil perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa efektifitas pbb sesuai dengan kriteria efektifitas menurut kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996.selama 2011-2014 penerimaan pbb secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini di sebabkan oleh penerimaan pbb yang selalu melampoi target yang di tetapkan serta rata-rata efektifitas pbb dari tahu 2011-2014 yang melebihi 100% atau sangat efektif yaitu sebesar 115,62%.

**Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2011-2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **PBB (Rp)** | **PAD (Rp)** | **Persentase** | **Kriteria Kontribusi** |
| 1 | 2011 | 44.397.200.209 | 142238867526 | 31,21% | Cukup |
| 2 | 2012 | 46.716.484.388 | 176.637.112.710 | 26,45% | Cukup |
| 3 | 2013 | 52.003.266.033 | 192.761.419.000 | 26,98% | Cukup |
| 4 | 2014 | 51.319.039.234 | 255.197.615.474 | 20,19% | Cukup |
| Rata-Rata Kontribusi | | | | 26,21% | Cukup |

*Sumber : data di olah*

Rumus kontribusi = PBB X100%

PAD

Uraian

1. 2011 = 44.397.200.209 X100%

142238867526

= 31,21%

2. 2012 = 46.716.484.388 X100%

176.637.112.710

= 26,45%

3. 2013 = 52.003.266.033 X100%

192.761.419.000

= 26,98%

4. 2014 = 51.319.039.234 X100%

255.197.615.474

= 20,19%

5. rata-rata kontribusi = Total Presentase Kontribusi X100%

Jumlah tahun

= 104,83 X100%

4

= 26,21

dari data di atas untuk pbb mulai tahun 2011-2014 berdasarkan kriterianya semua cukup memiliki kuntribusi tehadap pendapatan asli daerah kabupaten malang.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penguji analisis data yang telah peneliti lakukan, maka pembahasanya adalah sebagai berikut:

**5.1 efektifitas pajak bumi dan bangunan kabupaten malang secara keseluruhan tahun 2011-2014**

Pada tahun 2011 secara keseluruhan efektifitas pajak bumi dan bangunan kabupaten malang telah mencapai target yang telah ditetapkan, target pajak bumi dan bangunan tahun 2011 sebesar Rp.34.759.858.500 sedangkan pencapaian realisasinya sebesar Rp. 44.397.200.209.

Pada tahun 2012 sama seperti tahun 2011 yaitu target pajak bumi dan bangunansecara keseluruhan sangat efektif. Hal ini bukti nengan mencapai target yang telah melebihi target yang telah ditentukan. Target pajak bumi dan bangunan pada tahun 2012 adalah sebesarRp. 38,150,844,622 sedangkan untuk realisasi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp.46,716,384,388

Pada tahun 2013 target pajak bumi dan bangunan terbilang sangat efektif. Target pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan dapat melampaui.target pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan pada tahun 2013 adalah sebsar Rp. 49,509,641,000 sedangkan untuk realisasinya pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 52,003,266,033.

Pada tahun 2014 target pajak bumi dan bangunan sangat efektif. Target secara

keseluruhan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 48000,000,000. Sedangkan untuk realisasinya pajak bumi dan bangunan adalah mencapai sebesar Rp.51519,039,235.

Dengan demikian rata-rata presentase efektifitas pajak bumi dan banguanan keseluruhanya selama 2011-2014 adalah sebear 115,33%.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Diana dan Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia. edisi 3. Andi. Yogyakarta*

*Diakses Tanggal 6 Agustus 2015. (Penjelasa Undang-undang no 33 tahun 2004)*

*Erli Suandy.2014. Hukum Pajak Edisi 6. Jakarta:Salemba Empat*

*Erly Suandi,2002. Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat*

*Siahaan, Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.*

*Ferry susanti1 ,1 wayan suparta 2, husaini,jep Vol. 3 November 2014, Analisa Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*